

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arifin, Firmansyah, dkk. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)*. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo.
- I Gde Arya B Wiranata dan Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2014. *Aksi Perlindungan Anak Dalam Sorotan Media*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Huda, Ni'matul. 2007. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Manan, Bagir. 2006. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, PT. Alumni.
- Prints, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harla Sara Octarra, et-al. 2010. *Manual Sosialisasi Konvensi Hak-Hak Anak*, Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Yayasan Arti. Jakarta.
- Hadi Supeno, et-al. 2010. *Potret Anak Indonesia, Catatan Siluet dan Refleksi 2010*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jakarta.
- Arinanto, Satya. 2008. *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Zen, A. Patra M. 2005. *Tak Ada Hak Asasi yang Diberi*. Jakarta: Yayasan YLBHI.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soemitro, Roni Hanitjo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

JURNAL

Supriyanto, Agustinus. 2011. Perspektif Indonesia Mengenai Hak-Hak Asasi Anak; Refleksi Atas Undang-Undang dan Konvensi Internasional Terkait. *MIMBAR HUKUM*, Edisi Khusus, November 2011.

Basarah, Ahmad. 2014. Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State's Organ dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *MMH*. Jilid 43, Nomor 1.

Djusfi, Apri Rotin. Kedudukan dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Melindungi Hak-Hak Anak. *Jurnal Public Policy 1*.

S., Laurensius Arliman. 2016. Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum*. Volume 32, Nomor 2.

Gosita, Arif. "Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak". *Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Tarumanegara, Jakarta, Vol.V, No. 4, April 1999.

Triwahyuningsih, Susani. "Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia". *JURNAL HUKUM LEGAL STANDING*, Vol.2 No.2, September 2018.

Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm. 255-256.

Diamantina, Amalia. "Membangun Sistem Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia Yang Berperspektif Perlindungan Anak". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid. 42 No. 3*, Juli 2013.

Pradipta, Fariz. 2013. Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, dalam: Gokma Toni Parlindungan S, Tinjauan Umum Pembagian Kekuasaan Dalam Hukum Tata Negara Indonesia, *Jurnal Advokasi*, Volume 4, Nomor 2.

Bomer Pasaribu, "Upaya Penataan Kembali *State Auxiliary Bodies* melalui Peraturan Perundang-Undangan", Disampaikan dalam dialog hukum dan

non hukum “Penataan *State Auxiliary Bodies* dalam Sistem Ketatanegaraan” Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni 2007. hlm. 4.

Muchlis Hamdi, “*State Auxiliary Bodies* di Beberapa Negara”, Disampaikan dalam dialog hukum dan non hukum “Penataan *State Auxiliary Bodies* dalam Sistem Ketatanegaraan” Departemen Hukum dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya 26-29 Juni 2007. hlm. 1.

PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 (Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak/ KHA)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

INTERNET

“KONFIGURASI *STATE AUXILIARY BODIES* DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA”, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20298906-T30298-Evy%20Trisulo.pdf>

<https://www.kpai.go.id/profil>

Laporan Kinerja KPAI Tahun 2018, diakses pada laman <https://www.kpai.go.id/informasi-publik/laporan-tahunan/laporan-kinerja-kpai-2018>

Laporan Kinerja Tahun 2020 “*Perlindungan Anak di Era Pandemi COVID-19*”, diakses pada laman <https://www.kpai.go.id/files/2021/02/MEDIA-RELEASE-LAPORAN-AKHIR-TAHUN-2020-1.pdf>